

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan merupakan laporan posisi keuangan yang terstruktur dan mempunyai pedoman dalam pembuatannya. Laporan keuangan dibuat berdasarkan transaksi-transaksi yang terjadi dalam penggunaan dana perusahaan atau instansi. Laporan keuangan menunjukkan kinerja keuangan perusahaan pada tahun sekarang guna sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan perusahaan tahun berikutnya. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010. Laporan keuangan harus dilaporkan secara transparan dan akuntabilitas, khususnya pada sektor publik. Laporan keuangan pada sektor publik merupakan komponen penting dalam penyampaian informasi keuangan kepada publik. Perkembangan akuntansi sektor publik yang semakin pesat menimbulkan tuntutan yang lebih besar terkait dengan dilakukannya transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik (Mardiasmo, 2006).

Infomasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai (Suwardjono, 2005). Informasi yang mempunyai nilai apabila informasi tersebut mudah dipahami dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan oleh para pemakai. Kebermanfaatan merupakan suatu karakteristik yang hanya dapat ditentukan secara kualitatif dalam hubungannya dengan keputusan, pemakai dan keyakinan pemakai terhadap informasi. Oleh karena itu, kriteria ini secara umum disebut dengan karakteristik kualitatif atau kualitas informasi. Menurut Wahyono (2004) dalam menghasilkan suatu informasi yang bernilai (keterandalan), disini menyangkut dua elemen pokok yaitu informasi yang dihasilkan dan sumber daya yang menghasilkannya. Sumber daya manusia yang pengguna sistem dituntut untuk memiliki tingkat keahlian akuntansi yang memadai atau paling tidak memiliki kemauan untuk terus belajar dan mengasah

kemampuan di bidang akuntansi. Di sini kemampuan sumberdaya manusia itu sendiri sangat berperan dalam menghasilkan informasi yang bernilai (keterandalan dan ketepatanwaktu). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa kriteria kualitas informasi yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan pemerintah mempunyai nilai atau manfaat sebagaimana disebutkan dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan terdiri dari: (1) relevan, (2) andal, (3) dapat dibandingkan, (4) dapat dipahami. Oleh karena itu pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan.

Penelitian mengenai kualitas sumber daya manusia yang ada di instansi pemerintah pernah dilakukan oleh Anita (2012) yang dilakukan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Sumatera Barat pada tahun 2009 dan 2012, ditemukan bahwa masih sulit bagi aparatur di daerah untuk menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah secara transparan dan akuntabel, tepat waktu dan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Hal ini terutama disebabkan oleh kurangnya staf yang memiliki keahlian dalam mempertanggungjawabkan anggaran, khususnya bidang akuntansi. Disamping itu, pemahaman staf terhadap teknologi informasi masih kurang. Padahal untuk dapat terlaksananya pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, harus didukung oleh teknologi informasi yang memadai.

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Winidyanigrum (2010) yang memberikan temuan empiris bahwa sumber daya manusia di bagian keuangan yang ada di Pemerintahan Daerah Subosukowonosraten (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten) sudah mencukupi, baik dari sisi jumlah maupun kualifikasinya. Dari sisi jumlah, beberapa satuan kerja memiliki beberapa pegawai akuntansi. Dari sisi kualifikasi, sebagian besar pegawai sub bagian keuangan memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Perbedaan hasil penelitian keduanya inilah yang membuat peneliti tertarik untuk menganalisis lebih lanjut faktor-faktor apa yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.

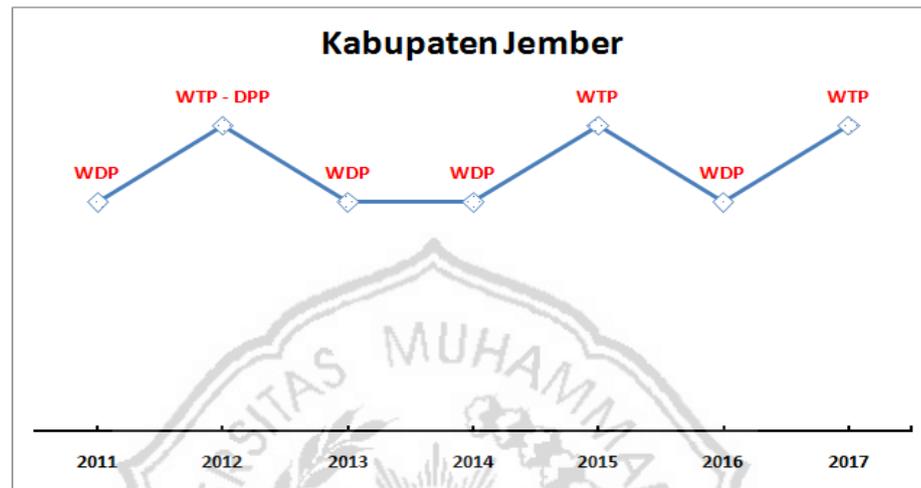
Faktor kedua yang mungkin mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mengembangkan dan memanfaatkan kemampuan teknologi informasi guna meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah (IKD) kepada publik. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Manfaat yang disajikan oleh suatu teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan penyiapan laporan, keakuratan data, penyimpanan data dalam jumlah besar, biaya pemrosesan yang lebih rendah (Ariesta, 2013).

Faktor ketiga yang mungkin mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah sistem pengendalian internal. Pengendalian internal merupakan satu cara untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi dan juga memiliki peran penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*) serta melindungi sumber daya organisasi. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa pengendalian intern merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program kegiatan serta dipenuhinya peraturan perundang-undangan. Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur untuk mencapai sasaran bersama, menjamin dan menyediakan laporan keuangan yang bernilai. Masalah yang perlu diperhatikan adalah tentang Sistem Pengendalian Intern (SPI), karena dalam penemuannya BPK tahun 2013 menyatakan bahwa masalah Sistem Pengendalian Internal dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menjadi perhatian bersama sehingga dapat mencapai efisiensi, efektivitas dan mencegah terjadinya kerugian keuangan negara (acch.kpk.go.id).

Penelitian ini akan dilaksanakan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Alasan peneliti melakukan

penelitian di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Jember karena adanya ketidak stabilan dalam hasil opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Jember dari BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur dalam 7 tahun terakhir sejak 2011 sampai 2017.

Gambar 1.1 Opini BPK terhadap LKPD Kabupaten Jember



Sumber : Surabaya.bpk.go.id

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, semua instansi pemerintahan baik pemerintah pusat maupun daerah wajib menerapkan akuntansi berbasis akrual sejak tahun anggaran 2015 (dpr.go.id). Dalam prakteknya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Jember belum memahami bagaimana yang dikatakan akuntansi berbasis akrual. Dapat dilihat pada gambar diatas tahun 2015 dimana sudah diberlakukannya akuntansi berbasis akrual, LKPD Kabupaten Jember mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) oleh BPK. Namun pada tahun 2016 mengalami kemunduran dengan mendapat opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) oleh BPK. Lalu pada tahun 2017 mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) oleh BPK. Dapat disimpulkan bahwa terjadi ketidak stabilan dalam LKPD Kabupaten Jember dalam menggunakan akuntansi berbasis akrual yang telah wajib digunakan.

Beberapa hal yang mungkin mempengaruhi masalah tersebut adalah pengendalian intern Pemerintah Daerah Jember, kualitas sumber daya manusia

yang masih belum memadai dalam ketepatan waktu pelaporan keuangan dan pemanfaatan teknologi informasi yang masih belum maksimal. Nilai informasi pelaporan keuangan tidak dapat terlepas dari dukungan beberapa faktor yaitu kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern. Hal ini mengacu pada penelitian Husna (2013) yang melakukan penelitian mengenai kualitas sumber daya manusia, pengawasan keuangan dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap nilai pelaporan keuangan diperoleh hasil bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas sumber daya manusia terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti ingin meneliti hubungan antara kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern dengan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah, alasan mengambil variabel tersebut diatas karena peneliti meringkas dari penelitian-penelitian terdahulu yang paing banyak menggunakan variabel tersebut, maka peneliti mengambil judul: “Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Nilai Informasi Pelaporan Kuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Jember).”

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Bagaimana opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Jember mengalami ketidak stabilan pada tahun 2015, 2016 dan 2017, dimana pada tahun tersebut sudah diberlakukannya akuntansi berbasis akrual di pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah ? Ketidak stabilan hasil opini BPK tersebut dapat terjadi karena kualitas sumber daya manusia yang kurang baik, pemanfaatan teknologi yang kurang maksimal serta sistem pengendalian intern yang kurang baik. Faktor-faktor yang mungkin dapat menghindari yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memanfaatkan teknologi informasi dengan maksimal serta memperbaiki sistem pngendalian intern yang ada.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah ?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah ?
3. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah
2. Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah
3. Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh sistem pengendalian intern terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Kegunaan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Akademisi
Memberikan tambahan wacana penelitian empiris bagi akademisi dan pertimbangan untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.
2. Bagi Pemerintah Daerah
Memberikan masukan yang berguna untuk dapat menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu.

3. Bagi penulis

Diharapkan dapat memahami pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah, serta menambah wawasan penulis dalam hal sektor publik maupun pemerintahan.

